

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam Laporan Pertumbuhan dan Pembangunan Inklusif 2018 yang dirilis oleh *World Economic Forum*, Indonesia berada di peringkat ke-22. *World Economic Forum* mencatat bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi di Indonesia terkait dengan upaya pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang berkontribusi pada kesetaraan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan bagian dari tujuan pembangunan global yang bertujuan untuk mengatasi masalah - masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Bagian Implementasi Pembiayaan Produktif dapat menjadi hal yang terpenting untuk mencapai sebagian dari 17 poin SDGs, diantaranya yang termasuk dalam Implementasi Pembiayaan Produktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini yaitu dengan adanya pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang memastikan untuk keberlanjutan ekonomi dan Salah satu isu yang kerap dihadapi oleh beragam negara adalah ketidaksetaraan dalam sektor ekonomi.

Permasalahan yang mencolok dalam hal ini adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Kedua aspek ini memiliki keterkaitan yang signifikan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, masalah kemiskinan dan pengangguran sangat penting untuk diberikan perhatian, mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai performa ekonomi suatu negara, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi. Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi dapat diukur dari kemampuannya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih merata, dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas.(Abiba & Suprayitno, 2023)

Kemiskinan yang memiliki jumlah perbedaan penduduk miskin antar provinsi di Indonesia, khususnya pada tingginya jumlah penduduk miskin di provinsi Pulau Jawa dibandingkan dengan provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa. Hal ini mencolok mengingat setiap provinsi memiliki akses dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memiliki kemudahan akses ke pusat pemerintahan. Namun demikian, perbedaan aksesibilitas dari pusat ke daerah, terutama antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Fenomena kemiskinan di Pulau Jawa juga menunjukkan variasi antar provinsi, dengan data spesifik yang menggambarkan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa Barat.

Berdasarkan hasil analisis Badan Pusat Statistik, ditemukan bahwa kemiskinan di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang rendah, durasi rata-rata pendidikan yang tidak mencapai standar pemerintah, dan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Dengan merinci faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka memiliki hubungan erat dengan kinerja PDRB, lamanya durasi sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka.

Kemiskinan di Kabupaten Majalengka memiliki akar penyebab yang melibatkan beberapa faktor. Salah satunya adalah fakta bahwa mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan cenderung tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang memadai, modal, dan keterampilan. Selain itu, umumnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh aset produksi dengan daya upaya sendiri. Pendapatan yang diterima tidak mencukupi untuk membeli tanah pertanian atau modal usaha.

(S. Hilma, 2023)

Menurut informasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, pada periode tahun 2018-2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta orang atau 9,66% dari total penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi. Namun, terdapat penurunan pada angka tersebut menjadi 24,79 juta orang, mencerminkan peningkatan kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Sebagai contoh, beberapa program seperti Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program-program lainnya telah berkontribusi dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Sehingga pencapaian dari SDGs ini untuk pengetasan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Majalengka Jatiwangi ini dengan menerapkan program KUR BSI karena dengan memenuhi kebutuhan finansial yang dapat mengembangkan usahanya, dan fasilitas yang diberikan BSI Majalengka Jatiwangi dengan memberikan pinjaman kebutuhan modal kerja yaitu dengan plafon sampai 50 juta untuk Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) berbeda dengan KUR yang ada di Bank Konvensional karena terdapat bunga sedangkan di KUR Bank Syariah Indonesia ini tidak menggunakan bunga untuk menawarkan pinjam nya. Dan jenis KUR BSI yang sering digunakan yaitu KUR Mikro BSI yang merupakan dari pembiayaan modal kerja. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat Jumlah penduduk miskin di Majalengka pada tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan hal tersebut merupakan bagian dari hal positif untuk selalu mengupayakan pengetasan kemiskinan yang ada di Majalengka Jatiwangi.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Majalengka
(Tahun, Ribu/Jiwa)**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	152.5 Ribu/Jiwa
2.	2017	150.3 Ribu/Jiwa
3.	2018	129.3 Ribu/Jiwa
4.	2019	121.1 Ribu/Jiwa
5.	2020	138.2 Ribu/Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka jatiwangi, 2022
(diolah <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/id/eprint/10506>)

Tingkat pengangguran terbuka pada dasarnya mencerminkan kapasitas ekonomi untuk menciptakan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin besar jumlah tenaga kerja yang tidak digunakan.

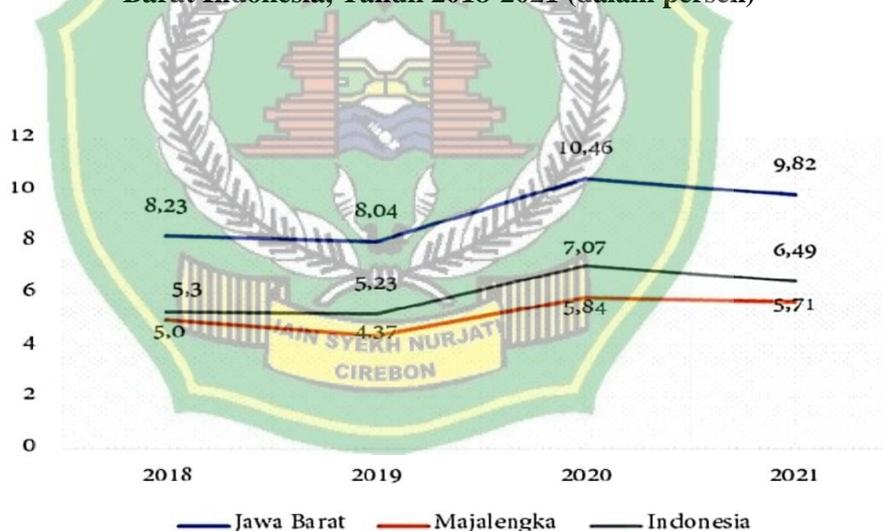
Indikator ini memberikan gambaran tentang kinerja pasar tenaga kerja dan perkembangan ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis, dan kemajuan teknologi. (Siti Nurhayati, 2023)

Menurut teori siklus ekonomi riil, pengangguran dianggap sebagai kejadian sementara. Konsep ini, diajukan oleh ekonom klasik, menyatakan bahwa pasar beroperasi dengan daya saing penuh dalam kondisi persaingan sempurna. Rumah tangga

dianggap memiliki pemahaman menyeluruh tentang pasar tenaga kerja, termasuk keseimbangan upah, permintaan, dan penawaran tenaga kerja. Teori ini menyatakan bahwa pasar tenaga kerja bersifat fleksibel, di mana upah dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan penawaran dan permintaan. (Mankiw, 2019).

Namun, pada kenyataannya, upah tidak selalu mengikuti perubahan permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja dengan mudah. Lebih tepatnya, kenaikan upah cenderung lebih mudah terjadi daripada penurunan upah. Sementara itu, salah satu faktor yang berdampak pada tingkat pengangguran adalah besarnya upah. Tinggi atau rendahnya tingkat upah menjadi faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Majalengka mencapai 5,84%, menjadi yang tertinggi selama empat tahun terakhir. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di bawah tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat dan secara keseluruhan di Indonesia pada tahun yang sama. (Siti Nurhayati, 2023)

Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Indonesia, Tahun 2018-2021 (dalam persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

(diolah <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/2903>)

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka, baik di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun Kabupaten Majalengka, selama periode 2018-2021, menunjukkan fluktuasi dengan pola pergerakan yang serupa. Peningkatan persentase pengangguran terbuka dalam dua tahun terakhir secara umum disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan hampir seluruh sektor ekonomi terhenti akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penurunan konsumsi rumah tangga dan daya

beli masyarakat juga berkontribusi pada menurunnya produksi dan peningkatan tingkat pengangguran (S. Hilma, 2023)

Penerapan Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi ini sudah menerapkan Prinsip dari (ESG) yaitu Environmental yang biasa disebut dengan Lingkungan untuk mempertimbangkan dampak operasional lingkungan nya seperti peran perusahaan untuk sebagai penjaga lingkungan yang penerapan sistem manajemen risiko nya yang efektif dalam pengelolaan risiko lingkungan, Social atau biasa disebut sosial ini untuk mempertimbangkan hubungan dan reputasi dari bank syariah ini dengan stakeholder(Kayawan/nasabah), dan Governance yang biasa disebut dengan tata kelola ini untuk mengetahui proses pengelolaan bank syariah Indonesia ini yang baik dan berkelanjutan pada bagian internalnya dan tata kelola yang berkaitan ini seperti kepemimpinan perusahaan, gaji eksekutif, audit, dan lain sebagainya (Firmanie, 2023).

Dan di Bank Syariah Indonesia ini sebenarnya implementasi prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainability*) ini sudah menjadi bagian dari nilai-nilai yang dijalankan sebagai penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. Sebab Bank Syariah Indonesia bagian dari pemberi pembiayaan ke sektor/industri non halal, Bahkan Bank Syariah Indonesia itu dalam memberikan pembiayaannya lebih memprioritaskan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada usaha yang berwawasan pada Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (ESG).

Adanya pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan perubahan paradigma baru yang harus dicapai untuk memperkuat aktivitas ekonomi. Ini melibatkan mencapai keseimbangan yang tepat antara mencari keuntungan tanpa mengabaikan dampak negatif pada lingkungan dan memperhatikan aspek sosial guna mencapai keuntungan yang lebih baik. Di seluruh dunia, banyak lembaga keuangan telah didirikan dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs(Suretno & Bustam, 2020).

Peranan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) sangat penting dalam mencapai target. Ekonomi syariah merupakan salah satu sektor di antara banyak sektor lainnya yang berperan penting dalam menggalang pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi syariah, baik di tingkat global maupun dalam skala nasional, terus berkembang di berbagai sektor dan Lembaga (Firmanie, 2023).

Dengan adanya Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memiliki dampak yang positif dan penting terhadap kemajuan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengusaha UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala

yang bisa menjadi tantangan bagi perkembangan usaha mereka. Dan terdapat tantangan ini umumnya muncul karena adanya batasan-batasan, yang termasuk dalam hal sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, keterbatasan dalam mengakses teknologi, kendala dalam merencanakan strategi bisnis, dan yang paling signifikan serta umum yang paling sering dialami oleh para pelaku UMKM adalah terbatas dan modal yang tersedia untuk menjalankan usaha nya yang dapat menghambat pelaku UMKM untuk melanjutkan usaha nya itu, dan pengembangan UMKM ini menjadi sektor yang paling penting dalam sistem perekonomian, (Aryanti, 2023)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai pilar ekonomi yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menghasilkan sumber pendapatan tambahan, sehingga dapat mengurangi tantangan pengangguran dan kemiskinan. Ini sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Diperlukan upaya dan dukungan yang komprehensif untuk mengembangkan dan memajukan UMKM sebagai solusi terhadap beberapa permasalahan ekonomi. UMKM memegang peran yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan jaringan pengaman bagi kegiatan ekonomi, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Dengan demikian, UMKM dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ekonomi seperti tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi Indonesia menjadi fokus pemerintah, yang berusaha meningkatkan jumlahnya melalui berbagai kebijakan. Upaya tersebut bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM sehingga dapat terus berkembang. Keberadaan UMKM memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam laporan berkelanjutan tahun 2021, BSI telah menyalurkan 27% dari portofolio pendanaannya untuk mendukung kegiatan usaha berkelanjutan (Aryanti, 2023).

Penyaluran dana tidak hanya ditujukan kepada perorangan atau perusahaan besar, melainkan juga memberikan prioritas pada pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki komitmen terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Hingga pada 31 Desember 2021, jumlah pembiayaan yang telah disalurkan kepada UMKM mencapai Rp 39.461 miliar, mencapai 108,35 persen dari target yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut. Sehingga Rasio portofolio UMKM terhadap total pembiayaan BSI mencapai 23%, dengan sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi sebesar 33,19 persen. Sementara itu, sektor pertanian juga turut

berkontribusi dengan 14,04% dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM.

Dari data yang diperoleh di Desa Sutawangi Jatiwangi Majalengka yaitu terdapat jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah sebanyak 200 lebih UMKM yang ada, dan menurut data yang terdaftar sebanyak 24 UMKM dengan jenis usaha mayoritas sebagai pedagang. Di desa ini juga rata - rata usaha yang sudah berdiri sekitar 3-17 tahun, dan data yang diperoleh bahwasanya UMKM di Desa Sutawangi mengalami perkembangan selama 5 tahun terakhir tetapi tidak secara signifikan. Dikarenakan adanya faktor modal. Sehingga BSI KCP Majalengka Jatiwangi ini dapat terus meningkatkan strategi dalam mengembangkan usaha untuk para pelaku UMKM (Aryanti, 2023).

Peran Perbankan Syariah dalam mendukung perkembangan usaha masyarakat, terutama di sektor usaha mikro, melibatkan partisipasi dalam memberikan pembiayaan kepada individu dan kelompok masyarakat guna memajukan usaha mereka. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, perbankan syariah berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian nasabah yang mendapatkan pembiayaan usaha mikro. Hal ini sejalan dengan upaya mencapai tujuan program SDGs (Trimulato, Nur Syamsu, Mega Octaviany, 2021).

Peran BSI dalam memberdayakan usaha sangat penting terutama kepada nasabah usaha mikro yang mengalami kendala dalam permodalan. BSI KCP Majalengka Jatiwangi adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang dalam kegiatannya berperan sebagai penghimpun dana dan penyedia dana yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan mendukung investasi atau bisnis yang sudah dijalankan sebelumnya. Dengan ini, bank syariah juga ikut menerapkan dalam pelaksanaan atau target-target SDGS, bank syariah memiliki bentuk nyata bukti atau dukungan dalam SDGS dalam lingkup *financial* salah satu contohnya yaitu dalam memberikan pembiayaan secara produktif terhadap pelaku ekonomi seperti khususnya untuk pembiayaan produktif modal usaha bagi para pelaku usaha UMKM. Ketika modal terbatas, hal ini dapat mengurangi peluang usaha mikro untuk tumbuh, sebagai contoh, peran usaha mikro tersebut bisa terbatas karena adanya kendala dalam meningkatkan usahanya timbul karena tidak mampu memenuhi permintaan nasabah (Trimulato, Nur Syamsu, Mega Octaviany, 2021).

SDGs memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pemberian dana produktif oleh BSI KCP Majalengka Jatiwangi. Pemberian dana produktif juga memiliki dampak positif dan signifikan pada perkembangan UMKM seperti menciptakan paradigma baru yang harus dicapai untuk memperkuat aktivitas ekonomi. Dalam upaya mencapai keuntungan ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan ini (SDGs) dapat secara tidak langsung memberikan dampak positif pada perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif (Island & Goals, 2022).

Terdapat produk dari pembiayaan produktif yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi ini yaitu adanya Pembiayaan mikro adalah bentuk dukungan keuangan yang diberikan untuk keperluan produktif atau modal usaha, seperti pengembangan usaha atau investasi. Dalam konteks ini, terdapat jenis pembiayaan mikro, yaitu KUR bertujuan untuk membantu pengusaha dalam tingkat menengah ke bawah dalam hal modal kerja dan investasi. Metode transaksi yang umum digunakan adalah murabahah, di mana bank berperan sebagai pihak yang menyediakan dana untuk pembelian barang yang telah disepakati bersama dengan spesifikasinya. Salah satu perbedaan antara bank syariah dan konvensional terletak pada objek transaksi, di mana bank syariah menekankan kejelasan objek transaksi dalam pembiayaannya.

Dengan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah BSI KCP Majalengka Jatiwangi yang menawarkan Pembiayaan Produktif atau Modal Usaha melalui transaksi murabahah, yaitu proses penjualan dengan harga beli barang yang sudah termasuk keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip akad murabahah, di mana harga pembelian barang dinyatakan secara jelas kepada pembeli, dan pembeli membayar lebih dengan jumlah yang telah disepakati sebagai keuntungan. Salah satu peran penting dari BSI KCP Majalengka Jatiwangi adalah sebagai penyedia dana bagi nasabah.

Mekanisme pembiayaan murabahah yang sederhana membuatnya diminati oleh nasabah. Nasabah yang menghadapi kendala modal dapat mengajukan pembiayaan murabahah di BSI KCP Majalengka Jatiwangi untuk mendukung perkembangan usaha mereka. Melalui pembiayaan produktif ini, nasabah memiliki peluang yang lebih besar untuk memperluas bisnis mikro mereka (Firmanie, 2023).

Keberadaan pembiayaan produktif yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah BSI KCP Majalengka Jatiwangi akan mempengaruhi perkembangan bisnis mikro tersebut, dan dengan pembiayaan produktif atau modal usaha dan Pembiayaan

Investasi karena yang menyangkut dengan modal usaha yang dipakai seperti bahan baku atau sarana untuk meningkatkan usaha nasabah, sedangkan untuk pembiayaan Konsumtif memang jarang dipakai karena hanya untuk Multiguna atau yang berpenghasilan tetap, Jadi dalam pembiayaan produktif itu dengan adanya pelaku usaha yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan modal usaha yang akan diberikan bank untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan, Dan menurut data yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi ini terdapat program pembiayaan KUR mikro dari data jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan produktif yang diberikan selama 5 tahun terakhir yaitu :

Tabel 1. 2 Rincian Jumlah Nasabah Pembiayaan Produktif

Tahun	Total Pembiayaan Produktif (dalam milyar rupiah)	Jumlah Nasabah (Orang)
2018	11.359	214 orang
2019	13.142	258 orang
2020	15.224	305 orang
2021	18,266	236 orang
2022	17.558	232 orang

Sumber : Wawancara Holis Soni S 10 September 2023

Dari data yang diperoleh mengenai Pembiayaan Produktif yang dilakukan di BSI KCP Majalengka Jatiwangi ini sudah mampu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 mencapai 11.359 milyar kemudian pada tahun 2019 mencapai 13.142 milyar, dan pada tahun 2020 mencapai 15.224 milyar, Namun pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami penurunan karena adanya Covid yaitu pada tahun 2020 mencapai 18.266 milyar dan pada tahun 2022 mencapai 17.558 milyar. Yang artinya dengan adanya program KUR mikro dalam pembiayaan produktif di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka ini sudah cukup memberikan manfaat yang baik khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk membantu pengembangan usaha mikro yang beregrak disektor ekonomi.

Adapun beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk menguatkan penelitian ini diantaranya pada penelitian Menurut

(Island & Goals, 2022), (Trimulato, Nur Syamsu, Mega Octaviany, 2021), (Aryanti, 2023) Pembiayaan produktif, UMKM dapat memperoleh akses kepada modal yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan. Selain itu, bank syariah juga menawarkan produk investasi yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Keberadaan lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs dengan berbagai produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Pembiayaan yang produktif ke sektor UMKM sangat sesuai dan sejalan dengan tujuan SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai pemerataan ekonomi. Pembiayaan Produktif dapat mendukung pertumbuhan para pelaku usaha kecil (UMKM) karena dengan adanya pembiayaan produktif oleh Bank BSI KCP Jatiwangi ini dapat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan secara positif pada peningkatan pendapatan para pelaku usaha (UMKM) (Aryanti, 2023).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana Implementasi Pembiayaan Produktif Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Bank Syariah KCP Majalengka Jatiwangi terhadap para pelaku usaha UMKM Sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS), yang salah satu misinya adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan dan perkembangan UMKM melalui akses permodalan yang tinggi melalui pembiayaan produktif dari bank syariah dapat menjadi solusi efektif. Hal ini bukan hanya sebagai bukti nyata, tetapi juga sebagai kontribusi konkret dari bank syariah terhadap pembangunan berkelanjutan. UMKM, dengan peran kunci yang dimainkannya, dapat secara signifikan meningkatkan perekonomian, menciptakan peluang kerja baru, dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut yaitu dengan judul “ **Implementasi Pembiayaan Produktif Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Bank Syariah KCP Majalengka Jatiwangi**”.

1.2.Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Bedasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Bank Syariah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang dimana topiknya mengenai Implementasi SDGs pada lembaga keuangan syariah dan akan dilakukan penelitian dengan judul Implementasi Pembiayaan Produktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Bank Syariah.

1.2.2. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Pembiayaan Produktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Bank Syariah.

1.2.3. Batasan Masalah

Dalam hal ini, terdapat banyak masalah yang telah diidentifikasi, dan untuk menghindari pembahasan yang tidak fokus atau tidak terarah dan menyebabkan pencapaian tujuan yang tidak tepat, langkah selanjutnya adalah membatasi cakupan permasalahan yang akan dibahas, yakni fokus pada masalah Bagaimana Implementasi Pembiayaan Produktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Bank Syariah.

1.2.4. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian akan menyajikan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Produktif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi?
- b. Bagaimana Konsep Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada Pembiayaan produktif di Bank Syariah KCP Majalengka Jatiwangi?
- c. Bagaimana Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi dalam meningkatkan pembiayaan produktif bagi UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pembiayaan Produktif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada Pembiayaan Produktif di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi yang digunakan Bank syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi untuk meningkatkan Pembiayaan Produktif UMKM.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka kegunaan atau manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya :

- a. Bagi Penulis

Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi (SE) Prodi Perbankan Syariah Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon guna meningkatkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan serta dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai pembiayaan produktif yang diberikan bank syariah terutama dalam pembangunan berkelanjutan bagi para pelaku usaha UMKM pada Bank Syariah KCP Majalengka Jatiwangi.

- b. Bagi Lembaga (BSI KCP Majalengka Jatiwangi)

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen bank dalam mendukung pembiayaan produktif, terutama dalam Pembangunan berkelanjutan bagi para pelaku usaha UMKM.

- c. Bagi Akademi

Sebagai bahan uji untuk penelitian perbandingan penelitian selanjutnya, hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan mendukung pengembangan pengetahuan yang lebih lanjut bagi pembaca. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana pembiayaan produktif terutama dalam pembangunan berkelanjutan bagi para pelaku usaha kecil.

1.5. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh (Island S, 2022) dalam jurnal nya yang berjudul “Penerapan Model Multidimensional Scaling Dalam Mendukung (MDS) Dalam Pembiayaan Bank Syariah di Pulau Sulawesi Dalam Mendukung SDGs” Dalam Penelitian ini melihat bahwa bank Syariah di Pulau Sulawesi yaitu di Kota Makkasar ini telah

memberikan kontribusi positif dalam memacu aktivitas ekonomi melalui penyediaan pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembiayaan yang bersifat konsumtif untuk masyarakat secara umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah disajikan oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penskalaan Multidimensi (MDS). Hasil dari Penelitian ini menyatakan bahwa penelitian menunjukkan Perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Juli 2020 hingga Juli 2021 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada beberapa jenis pembiayaan. Pembiayaan Musyarakah di BPRS mengalami peningkatan sebesar 43 persen, sementara Murabahah di BUS tumbuh sebesar 8,6 persen, dan Qard mengalami pertumbuhan di UUS.

Hasil analisis Model Penskalaan Multidimensi menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BUS, UUS, dan BPRS di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, memiliki jarak yang cukup jauh, sementara untuk daerah lain, jaraknya lebih dekat atau memiliki kesamaan. dan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Pulau Sulawesi memiliki dampak positif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Beberapa aspek dari SDGs yang diperkuat oleh pembiayaan ini melibatkan upaya untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta mendukung produksi berkelanjutan dan pola konsumsi.

Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu dilakukan lokasi penelitian nya di provinsi sulawesi sedangkan pada lokasi penelitian ini dilakukan di Majalengka Jatiwangi, kemudian pada penelitian terdahulu subjeknya yaitu penerapan MDS dalam pembiayaan bank syariah dalam mendukung SDGs sedangkan pada penelitian ini subjeknya mengenai Implementasi Pembiayaan Produktif di Bank Syariah untuk mencapai SDGs, Dan Persamaan dalam penelitian ini sama - sama bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada, dengan melalui Pembiayaan untuk memajukan pendapatan UMKM dan pembiayaan modal usaha (Pembiayaan produktif) khusus nya bagi pelaku UMKM dalam mendukung Pencapaian SDGs.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh (Khadijah, 2021) dalam jurnal nya yang berjudul “Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah Studi Kasus Pt Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat” terdapat faktor yang menyebabkan tingkat pembiayaan produktif (mudharabah dan musyarakah) yang rendah. Faktor-faktor tersebut meliputi

ketidakpercayaan dalam industri, risiko pembiayaan, pembagian laba yang tidak optimal, keterbatasan dalam nasabah yang sudah memiliki usaha, dan keterbatasan dalam sektor usaha yang mendapatkan pembiayaan.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian terdahulu ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang melibatkan penggunaan observasi, wawancara, dan analisis studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan total pembiayaan produktif mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Terdapat lima faktor yang berkontribusi pada rendahnya tingkat pembiayaan produktif, yakni krisis kepercayaan, risiko pembiayaan, pembagian keuntungan, keterbatasan nasabah yang sudah memiliki usaha, dan keterbatasan sektor usaha yang mendapatkan pembiayaan. Beberapa strategi untuk meningkatkan pembiayaan produktif (mudharabah dan musyarakah) di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat mencakup kegiatan edukasi, peningkatan kapasitas Unit Head Mikro (UHM) bank, kolaborasi dengan mitra untuk memberikan pembinaan kepada debitur, dan memastikan bahwa pembinaan dilakukan secara berkelanjutan.

Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu yaitu adanya penurunan pembiayaan produktif dalam kurun waktu 4 tahun Sedangkan dalam penelitian saya ini bahwa pembiayaan produktif di BSI KCP Majalengka Jatiwangi ini mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Dan Persaman dalam Penelitian ini yaitu keterbatasan nasabah yang sudah memiliki usaha namun tidak dapat melanjutkan usahanya karena faktor pembiayaan modal usaha.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh (Trimulato et al., 2021) dalam jurnal nya yang berjudul “Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah” dalam penelitian ini terdapat masalah bahwa Bank syariah menyediakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan usaha skala kecil, mikro, dan menengah. Secara umum, distribusi pembiayaan di bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan konsumtif, mencapai 42,80 persen yang ditunjukkan bahwa pembiayaan konsumtif ini hanya untuk kebutuhan konsumsi yang dimana kebutuhan itu akan habis.

Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berarti menguraikan suatu subjek penelitian. Jenis data yang dipergunakan dalam laporan ini adalah data kualitatif yang berasal dari sumber data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan adanya penurunan dalam pembiayaan produktif yang tersedia dan sebagian besar pembiayaan diarahkan ke UMKM yang masih bersifat konsumtif, mencapai 69,14 persen atau setara dengan jumlah 139.408.000.000, Dari total alokasikan pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai 201.637.000.000, yang setara dengan 69,14 persen, sementara bagian yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan UMKM produktif hanya sekitar 30,86 persen. dan Distribusi pembiayaan produktif ke sektor UMKM bertujuan untuk kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu masih lebih berdominan menggunakan pembiayaan konsumtif yang dikhususkan untuk multiguna atau yang berpenghasilan tetap sedangkan dalam penelitian saya lebih membahas tentang adanya kenaikan pembiayaan produktif selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan jumlah pembiayaan sebesar 75.509 milyar dengan jumlah nasabah sebanyak 1.245 orang. Dan Persamaan dalam penelitian ini sama - sama membahas tentang kesejahteraan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan adanya pembiayaan modal usaha untuk para pelaku UMKM.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanto, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada Bank Syariah Menggunakan Konsep 5C (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)” dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor penyebab risiko yang dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal sehingga dengan Mengevaluasi risiko pembiayaan untuk UMKM di bank syariah menggunakan pendekatan 5C, bank harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi atau meramalkan potensi risiko-risiko yang mungkin timbul setelah pembiayaan disalurkan kepada nasabah agar terhindar dari potensi risiko atas kecerobohan petugas pembiayaan atau lembaga pembiayaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data baik primer maupun sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data akan melibatkan proses editing, pengorganisasian data, dan analisis data.

Hasil dari penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa dalam menganalisis risiko pembiayaan pada Bank Syariah untuk UMKM dengan menggunakan konsep 5C, penting bagi pihak bank untuk memahami atau meramalkan risiko-risiko yang mungkin timbul

setelah nasabah mendapatkan pembiayaan. Ditemukan bahwa ketidakcermatan petugas pembiayaan atau BPRS dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, kurangnya dokumentasi yang baik terkait data pembiayaan nasabah, serta adanya faktor internal dan eksternal sebagai penyebab. Upaya untuk menangani pembiayaan yang bermasalah di BPRS Bandar Lampung melibatkan penggunaan sistem rescheduling atau penjadwalan ulang, reconditioning atau perubahan persyaratan kembali, dan restructuring atau penataan kembali.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu menggunakan konsep 5C Sedangkan dalam penelitian saya lebih membahas Pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi ini untuk para pelaku usaha UMKM lebih menggunakan jenis pembiayaan produktif dengan menggunakan akad murabahah yaitu suatu transaksi jual beli yang melibatkan barang, di mana harga penjualan adalah harga perolehan tambah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas bagaimana kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah dalam menerima pemberian modal usaha yang diberikan bank syariah .

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh (Trimulato, Amiruddin, Ismawati, 2020) dalam jurnal nya yang berjudul “Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” penelitian ini terdapat faktor perkembangan UMKM di Bank syariah sebaiknya menjalin kemitraan dengan UMKM yang memiliki kemampuan untuk menyajikan laporan keuangan, dan terdapat beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab pertumbuhan UMKM yang lambat melibatkan kendala seperti kekurangan modal, keterbatasan keterampilan sumber daya manusia, dan persaingan bisnis yang ketat. Dengan mengindikasikan bahwa peran dan dukungan pembiayaan dari perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Makassar masih belum mencapai optimalisasi yang diharapkan.

Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Proses analisis data ini dilakukan melalui prosedur kualitatif.

Hasil dari penelitian terdahulu ini bahwa pemanfaatan pembiayaan produktif oleh Bank Syariah untuk UMKM belum mencapai tingkat optimal karena pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut belum memperoleh prioritas yang cukup tinggi, dan sebaliknya, pembiayaan dalam sektor konsumtif masih mendominasi. Diantara penyebab belum

optimalnya pembiayaan produk bagi UMKM adalah disebabkan bank syariah masih dominan pada sektor konsumtif, sebesar 41% dari total pembiayaan.

Perbedaan penelitian terdahulu ini yaitu pada penelitian terdahulu difokuskan pada analisis optimalisasi kinerja pembiayaan produktif di Indonesia bukan pada wilayah tertentu sedangkan penelitian ini dilakukan pada salah satu bank syariah di wilayah Majalengka Jatiwangi. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai implementasi dari pembiayaan produktif yang diberikan bank untuk para pelaku usaha UMKM.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Peran (Awwalunnisa, 2021) dalam jurnal nya yang berjudul “Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat” Penelitian ini terdapat faktor penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) aktif melalui pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Dalam konteks statistik, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 713.887 jiwa (13,97%) pada tahun 2020, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 735.960 jiwa (14,75%) pada 2019, dan 737.460 jiwa (16,07%) pada 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan metode analisis deskriptif, Sumber data dan informasi yang digunakan bersifat sekunder, berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), LAZ DASI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu Pemerintah Provinsi NTB telah mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan kelanjutan dari Mellenium Development Goals (MDGs) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. Dalam upaya mengurangi kemiskinan, langkah-langkah dilakukan dengan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan fasilitas permodalan. Upaya ini tidak hanya bersumber dari perbankan konvensional dan koperasi, tetapi juga melibatkan perbankan syariah.

Pemberdayaan UMKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan. Perkembangan BMT di Provinsi NTB memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperoleh modal usaha, sehingga usaha mereka dapat berjalan lancar. Keberadaan BMT yang terletak dekat dengan nasabah dan pusat ekonomi

dapat memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat kurang mampu atau menengah ke bawah, dengan harapan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi NTB.

Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan Lembaga Keuangan Syariah sedangkan pada penelitian saya menggunakan Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi, dan perbedaan lainya penelitian terdahulu ini subjek nya secara umum peran lembaga keuangan syariah untuk pengetasan kemiskinan sedangkan penelitian saya subjek nya fokus pada Pembiayaan produktif terhadap UMKM untuk mencapai SDGs. dan Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama peran lembaga keuangan untuk pengetasan kemiskinan.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh (Hayati et al., 2020) dalam jurnal nya yang berjudul " Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals" Penelitian ini terdapat permasalahan sosial dan lingkungan yang sebelumnya tidak termasuk dalam penghitungan ekonomi kini diakui sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan. Sejumlah lembaga keuangan global telah mengambil inisiatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Metode penelitan terdahulu ini menggunakan Metode analisis yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, di mana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran data secara online.

Hasil dari penelitian terdahulu ini Peran keuangan berkelanjutan dalam industri perbankan saat ini, yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan lain nya dalam proses pembangunan, terkait untuk menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk merinci kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan jangka panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan. Inisiatif ini juga dirancang untuk memberikan kontribusi sekaligus memanfaatkan peluang bisnis dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang tahan terhadap perubahan iklim, serta berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini tidak adanya fokus lokasi penelitian oleh subjek yang diteliti sedangkan pada penelitian saya berfokus pada pembiayaan produktif yang diberikan BSI KCP Majalengka Jatiwangi. dan Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama mengenai peranan perbankan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh (Suretno & Bustam, 2020) dan jurnal nya yang berjudul “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM” dan penelitian terdahulu ini terdapat permasalahan Saat ini, banyak masyarakat yang masih terperangkap dalam penggunaan kredit bunga yang diharamkan, yang tidak membawa manfaat melainkan kerugian. Produk-produk yang ditawarkan oleh pembiayaan bank syariah dengan jelas mengadopsi prinsip-prinsip pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Akad-akad ini digunakan dalam kerangka sistem yang menghasilkan keuntungan yang adil baik untuk pihak nasabah maupun bank syariah itu sendiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif, dimana penelitian ini menginvestigasi data dan informasi terkait peran bank syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal kerja pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sumber data yang digunakan berasal dari buku, jurnal, dan referensi bacaan lain yang relevan.

Hasil dari penelitian terdahulu ini bahwa Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti efektif dalam meningkatkan sektor riil, memberikan dorongan positif terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan ini juga dapat diatribusikan kepada sektor UMKM yang terbukti mampu bertahan dalam menghadapi dua krisis ekonomi, yaitu pada tahun 1997 dan 2008.

Oleh karena itu, kontribusi bank syariah dalam pengembangan UMKM diharapkan dapat mencapai potensi maksimal dengan peningkatan aksesibilitas dan peningkatan porsi pembiayaan. Saat ini, perlu diperhatikan bahwa porsi pembiayaan produktif dari bank syariah masih relatif kecil, mencapai kurang dari 20%, sementara pembiayaan konsumtif lebih dari 80%. Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan produktif guna mendukung pertumbuhan sektor UMKM secara lebih optimal.

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini membahas lebih ke pelaksanaan dan peranan Bank Syariah Indonesia ini untuk memberikan pembiayaan modal bagi umkm agar umkm ini semakin produktif dan memiliki peranan yang penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. yaitu berbeda di lokasi penelitian dan Persamaan pada penelitian terdahulu ini sama-sama Bank Syariah berperan sebagai pemberi pembiayaan modal kerja pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh (Husniyah et al., 2022) dalam jurnal nya yang berjudul “Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Sibolga” Penelitian ini terdapat bahwa di Kota Sibolga, yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara, mengalami pertumbuhan UMKM yang signifikan setiap tahunnya. Dalam periode lima tahun terakhir, jumlah UMKM di kota ini terus meningkat secara mencolok. Peran penting UMKM ini terlihat dalam penciptaan lapangan kerja, membantu mengurangi tingkat pengangguran. Namun, seiring dengan pertumbuhan UMKM di Kota Sibolga, terjadi kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran.

Meode yang digunakan oleh penelitian terdahulu ini menggunakan Metode penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif dengan karakteristik penelitian deskriptif. Populasi yang menjadi fokus penelitian ini mencakup seluruh pelaku UMKM di Kota Sibolga, dengan penggunaan teknik stratified random sampling untuk pengambilan sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini telah ditetapkan berdasarkan tabel Krejcie & Morgan, yang sejumlah 191 responden.

Hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa Dalam variabel dampak UMKM terhadap tingkat kemiskinan, signifikansi dapat diinterpretasikan melalui hasil dengan nilai $0,00 < 0,05$. Artinya, nilai signifikansi lebih rendah dari nilai batas signifikansi yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji koefisien determinasi, terlihat bahwa dampak UMKM memberikan pengaruh sebesar 26,9% terhadap tingkat kemiskinan, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, Jadi Dampak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, sementara dampak UMKM juga berdampak secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Secara bersamaan, tingkat pengangguran juga memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini subjek nya hanya berfokus pada Dampak usaha untuk UMKM sebagai pengentasan kemiskinan dan pengangguran sedangkan penelitian saya subjek nya berfokus untuk pembiayaan produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai dari tujuan SDGs yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Persamaan pada penelitian ini sama-sama mengenai bagaimana UMKM dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Kesepuluh , Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Lestari, 2021) dalam jurnal nya yang berjudul ”Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (Umkm) (Studi

Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)”. Penelitian terdahulu ini terdapat pendanaan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, sebenarnya serupa dengan pendanaan yang ada di Bank Syariah Mandiri secara umum. Ini mencakup Bank Syariah Mandiri Implan, pembiayaan perumahan BSM, pinjaman untuk pembelian kendaraan, pendanaan bagi pensiunan, pembiayaan umrah BSM, angsuran emas BSM, serta gadai emas di BSM.

Merode Penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, sementara teknik pengumpulan data melibatkan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian terdahulu ini bahwa Peran pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan pendapatan usaha nasabah, sementara aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal masih rendah. UMKM di daerah Padang Lawas pada tahun 2020 masih mengalami stagnasi, walaupun mengalami penurunan pendapatan akibat restrukturisasi yang diinisiasi pemerintah sebesar 50-75 persen.

Keberadaan Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat atau nasabah yang memerlukan pembiayaan mikro untuk mengembangkan usaha, seperti pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kontribusi Bank Syariah Mandiri terhadap perkembangan usaha UMKM nasabah.

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini subjek pembiayaannya secara umum lebih ke pembiayaan perumahan BSM, pinjaman untuk pembelian kendaraan, pendanaan bagi pensiunan, pembiayaan umrah BSM, angsuran emas BSM, serta gadai emas di BSM sedangkan pada penelitian saya subjek pembiayaannya hanya fokus untuk pembiayaan produktifnya, Persamaan pada penelitian terdahulu ini sama-sama ingin mengembangkan Usaha UMKM seperti pedagang kaki lima dan lain sebagainya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi yang telah dijelaskan, muncul sebuah kerangka pemikiran bahwa Implementasi produk keuangan Syariah dalam konteks SDGs saat ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pencapaian SDGs dapat terwujud melalui upaya mobilisasi sumber daya yang signifikan. Fakta menunjukkan bahwa mobilisasi semacam ini memerlukan pengembangan produk

keuangan yang berfokus pada pencapaian SDGs, serta keberhasilan program-program yang mendukung SDGs.

Selanjutnya, untuk menarik sumber daya yang diperlukan, program-program SDGs harus memberikan jaminan hasil yang dapat meyakinkan para pemangku kepentingan. Program-program yang paling efektif seperti dalam pendanaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia melalui Pembiayaan produktif/ Pembiayaan modal usaha untuk para pelaku usaha UMKM dapat mengatasi pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan pengetasan kemiskinan dan kesejahteraan.

Pembiayaan Produktif yang tersedia di bank syariah memiliki potensi untuk mendukung skala yang lebih besar dalam aktivitas ekonomi, terutama bagi para pelaku UMKM dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Kemudahan akses ke layanan keuangan oleh masyarakat memungkinkan UMKM untuk mengakses produk keuangan syariah, terutama pembiayaan produktif yang disediakan oleh bank syariah. Ini akan berkontribusi pada peningkatan usaha, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dengan adanya pembiayaan produktif, UMKM akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses ke modal yang mendukung pertumbuhan bisnis mereka, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan pendapatan (Island S, 2022)

Produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi ini sangat beragam, termasuk pada pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan produktif yang tersedia di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi dapat digunakan untuk mendukung ekonomi dalam skala yang lebih besar, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs).

Pemanfaatan produk pembiayaan dapat dioptimalkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, sehingga peran bank syariah dalam mendukung SDGs menjadi lebih signifikan, terutama ketika produk pembiayaan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaku UMKM. Hal ini dapat membantu mencapai tujuan SDGs yang berkaitan dengan kesejahteraan. Dengan ketersediaan akses keuangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, UMKM dapat mengakses produk pembiayaan syariah, terutama yang berfokus pada pembiayaan produktif dari bank syariah, sehingga mereka dapat meningkatkan usaha mereka, pendapatan, dan taraf hidup masyarakat secara lebih luas. Pembiayaan produktif akan memberikan UMKM akses ke modal untuk mendukung

pertumbuhan bisnis mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Selain itu, bank syariah juga dapat menyediakan produk investasi yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Dengan kehadiran lembaga keuangan syariah, berbagai produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat akan berperan dalam mendukung pencapaian SDGs. (Island S, 2022)

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru, Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat pada perkembangan dunia saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan manusia di masa depan. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. utama dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

SDGs juga memiliki sasaran untuk mencapai kesetaraan ekonomi, dan kehadiran lembaga keuangan mikro syariah membuka pintu akses bagi layanan keuangan yang merata bagi lapisan masyarakat yang lebih rendah. Salah satu pencapaian yang diupayakan dalam SDGs dalam sektor ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan dan distribusi kesejahteraan yang merata. Bank syariah memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs ini dengan meningkatkan peran sebagai lembaga keuangan syariah yang berinteraksi secara intensif dengan masyarakat (Iis, 2023)

Bank syariah memiliki berbagai jenis pembiayaan untuk sektor produktif yang memberikan akses kepada individu atau entitas yang memerlukan tambahan modal untuk usaha mereka. Dengan pengelolaan pembiayaan produktif yang tepat dan pengalokasiannya yang sesuai, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan melalui aktivitas ekonomi serta distribusi pendapatan yang lebih merata. akses keuangan syariah dapat diperluas kepada semua pihak dengan mudah, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk produk investasi syariah.

Di samping itu, ekonomi Islam juga memiliki lembaga sosial yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana kepada penerima yang berhak, sebagai upaya untuk mencapai redistribusi kekayaan secara sosial. Hal ini mencerminkan nilai-nilai seperti kepedulian terhadap sesama manusia, saling peduli, dan saling memberi dukungan satu sama lain. Dengan segala aspek yang dimilikinya, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs dengan berbagai cara. Berikut merupakan Kerangka Pemikiran mengenai Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran Implementasi Pembiayaan Produktif Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Bank Syariah

Dari bagan di atas bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi sebagai pemberi modal usaha, yang kemudian modal tersebut berupa jenis pembiayaan produktif yang diutamakan dan diberikan pada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK), untuk mencapai sebagai bagian dari 17 poin SDGs yang diantaranya yaitu untuk pengetasan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Sutawangi Jatiwangi Majalengka.

1.7. Metode Penelitian

Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani, yakni "methodos," yang merujuk pada cara atau prosedur untuk mencapai suatu tujuan. Metode adalah proses ilmiah yang terkait dengan metode kerja tertentu dalam pemahaman terhadap subjek dan objek penelitian, dengan tujuan untuk mencapai jawaban yang dapat dijustifikasi secara ilmiah.

Adapun bagian ini akan mencakup hal-hal yang secara langsung terkait dengan topik penelitian, yaitu :

1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang berfokus untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Sugiyono,

2002:225).

Alasan penulis menggunakan kualitatif karena dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat mengetahui cara pandang dari objek penelitian dengan lebih mendalam dan penggambaran objek penelitian berdasarkan data faktual yang ada karena tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi, menyajikan informasi, dan menganalisis informasi mengenai pembiayaan produktif yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi ini khususnya bagi para pelaku usaha UMKM yang diperoleh melalui wawancara dengan yang bersangkutan dan adanya dokumentasi guna memberikan gambaran yang mendalam tentang objek penelitian, dan mengutip dari berbagai sumber-sumber yang relevan dalam menganalisis data yang diperoleh sebagai sumber informasi untuk mengetahui tingkat pembiayaan produktif di Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Majalengka Jatiwangi. Untuk menggali informasi terkait masalah yang sedang dibahas dan Hasil penelitian ini nantinya akan diolah dan dianalisis untuk merumuskan kesimpulan yang relevan.

Jenis Pendekatan Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian untuk dapat memperoleh data berupa kalimat-kalimat deskriptif dan gambar-gambar visual, serta melibatkan pengamatan perilaku secara langsung (Romdhoni, 2016:3). Melainkan prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari suatu masalah yang diteliti.

1.7.2. Sumber Data

Pentingnya sumber data dalam penelitian tidak bisa diabaikan, karena data menjadi dasar untuk mendukung temuan yang diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa melalui perantara, dan data ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan dari sumber data utama yang berada di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti individu atau perseorangan, yang kemudian data tersebut dikumpulkan dan diproses oleh peneliti sendiri. Sumber data primer adalah sumber informasi yang mengenai Pembiayaan Produktif Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi bagi para pelaku usaha UMKM untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan oleh pihak yang mengumpulkan data primer atau oleh entitas lainnya, seperti pengumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber yang mendukung studi ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen di Bank yang dianggap relevan, publikasi jurnal, laporan skripsi, tesis, konten media sosial, dan referensi data dalam bentuk tabel dan sumber-sumber literatur mengenai pembiayaan produktif di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi bagi para pelaku usaha UMKM untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

1.7.3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, Subjek Penelitian adalah rujukan kepada objek tempat atau individu perorangan yang menjadi fokus dalam penelitian, yang juga menjadi sumber informasi data untuk variabel yang sedang diteliti, dan yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian tersebut, Subjek dalam penelitian kualitatif disebut Informan atau sumber informasi penelitian. Adapun yang menjadi Subjek Penelitian ini merupakan narasumber yang terlibat dalam penelitian ini yaitu, *Business Manager* dan Bidang Marketing pada Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi.

Objek penelitian adalah hal atau aspek yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian atau masalah yang sedang diteliti. Baik dari orang, objek maupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Tujuan dari memilih objek ini yaitu untuk mencari jawaban. Sehingga yang menjadi penelitian ini adalah dari Objek penelitiannya yaitu Implementasi Pembiayaan Produktif untuk mencapai pembangunan Berkelanjutan di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang sedang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi / Pengamatan

Observasi merupakan langkah dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari sumber pertama dengan cara mengamati situasi atau objek tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat

digunakan sebagai dukungan dalam penelitian. Observasi juga dapat dilakukan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung, Tujuan dari observasi adalah untuk menggambarkan situasi yang sedang diteliti, kegiatan yang tengah berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, serta makna dari peristiwa tersebut berdasarkan sudut pandang mereka yang terlibat dalam pengamatan tersebut. Metode ini digunakan sebagai tahap awal dalam penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Ini melibatkan pengamatan langsung di lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang di amati oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab seperti dialog interaktif antara pihak yang membutuhkan informasi (peneliti) dengan pemberi informasi (Responden), dengan tujuan untuk menggali informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti kepala Cabang dan karyawan BSI Majalengka Jatiwangi dengan memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka mengenai informasi dan data-data yang relevan dan sesuai dengan tujuan apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menyusun dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang tepat berupa catatan dari sumber informasi khusus, seperti gambar, teks, naskah, dan sebagainya mengenai masalah yang dibutuhkan peneliti yaitu implementasi pembiayaan produktif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bagi para pelaku usaha UMKM, tentang Strategi apa yang digunakan BSI Majalengka Jatiwangi ini dalam peningkatan pembiayaan produktif dan Peran Pembiayaan Produktif BSI KCP Majalengka Jatiwangi bagi UMKM untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai rujukan dari penelitian.

1.7.5. Metode Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dimana peneliti turun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak Bank dan Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi dan melakukan

dokumentasi.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, oleh karena itu, penting untuk mencatatnya secara cermat dan terperinci. Semakin lama peneliti berada dilapangan, semakin kompleks dan rumit jumlah peneliti data yang terkumpul. Oleh karena itu, diperlukan analisis data yang cepat melalui proses reduksi data. Reduksi data berarti menggambarkan inti dari data, memilih elemen-elemen kunci, fokus pada informasi yang penting, dan mengidentifikasi tema dan pola yang relevan.

c. Penyajian Data

Mengorganisir data yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan kode yang tepat. Menyajikannya dalam bentuk teks deskriptif yang tepat dan mudah dipahami secara keseluruhan. Memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang berguna untuk analisis dan penelitian lanjutan. Dalam konteks ini, proses ini melibatkan transformasi dari catatan audio menjadi teks secara langsung. Penulis akan mendengarkan hasil rekaman berulang kali untuk memahami isi dari wawancara tersebut. Hasil ini kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik penelitian. Selanjutnya, dilakukan interpretasi menyeluruh, yang mencakup kesimpulan utama dari hasil penelitian tersebut.

d. Kesimpulan atau Verifikasi

Hasil penelitian yang telah terkumpul perlu dianalisis ulang dengan mengikuti proses reduksi data dan penyajian data yang tepat. Hal ini diperlukan agar kesimpulan yang telah di evaluasi dapat dikemukakan dalam bentuk laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Kesimpulan yang dihasilkan akan bergantung pada volume data yang dikumpulkan selama penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, Peneliti mengadopsi metode deduktif untuk merumuskan kesimpulan, yang merupakan pendekatan analisis yang dimulai dari pernyataan umum dan kemudian dijabarkan kedalam contoh konkret atau fakta spesifik.

1.7.6. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penjaminan Keabsahan Data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sumber data tambahan di luar data yang sedang

dianalisis. Dalam konteks ini, triangulasi sumber yang digunakan secara khusus, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dari berbagai sumber atau informan. Hal ini dilakukan untuk memahami penyebab perbedaan dalam pandangan, pendapat, atau pemikiran yang muncul dalam data.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti akan membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, yang berisi beberapa sub bab diantaranya mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan teknik sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori, yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari buku atau beberapa literatur review yang berkaitan dengan penelitian mengenai peran produk pembiayaan produktif bank syariah terhadap UMKM untuk mendukung program SDGS dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

BAB III PROFIL KONDISI OBYEKTIF

Profil Lembaga atau Instansi yang terkait.

BAB IV PEMBAHASAN

Memuat hasil Penelitian dan pembahasan yang terdiri dari profil informan, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta dilengkapi daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran.